

# JURNAL KAJIAN BALI

*Journal of Bali Studies*

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698

Volume 08, Nomor 01, April 2018

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

---

Terakreditasi Peringkat B Berdasarkan SK Menristek Dikti  
No. 12/M/KP/II/2015 tanggal 11 Februari 2015

---

Pusat Kajian Bali  
Universitas Udayana

# Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa

I Made Adikampana, Luh Putu Kerti Pujani,  
dan Saptono Nugroho  
Universitas Udayana  
Email: adikampana@unud.ac.id

## Abstract

This article examines the local community participation in the Candidasa tourism area, Karangasem, Bali. The objectives are to identify the capital exchange practice of local communities with the tourism industry and then determine the type of local communities' participation in the development of Candidasa tourism area. The community based tourism approach adopted to understand the phenomenon of local community participation. Based on observations and interviews can be addressed that the communities surrounding the Candidasa relatively have an exhaustive capital. However, the comprehensiveness of such capital is not accompanied by the proper capital exchange strategies by indigenous village institution as a representation of local communities. The local communities only get relief materials from tourism as a result of the capital exchange. Accordance with the practice of capital exchange, it can be said that this type of local community participation is included in the participation for material incentives. This type of community participation is still relatively limited, so it necessary to improve the their involvement into tourism development in Candidasa.

**Keywords:** participation, local community, capital exchange, material incentives, Candidasa

## Abstrak

Artikel ini membahas partisipasi masyarakat lokal di Kawasan Pariwisata Candidasa, Karangasem, Bali. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik pertukaran modal antara masyarakat lokal dengan industri pariwisata dan kemudian menentukan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat

lokal digunakan untuk memahami fenomena partisipasi masyarakat lokal. Berdasarkan observasi dan wawancara dapat dinyatakan bahwa masyarakat sekitar kawasan relatif memiliki modal yang lengkap. Namun, kelengkapan modal tersebut belum disertai dengan strategi pertukaran modal yang tepat terutama oleh desa adat sebagai representasi masyarakat lokal. Masyarakat lokal hanya mendapatkan bantuan material sebagai hasil pertukaran modal tersebut. Berdasarkan praktik pertukaran modal yang terjadi, dapat dikatakan bahwa jenis partisipasi masyarakat lokal di kawasan ini termasuk dalam partisipasi untuk material insentif. Jenis partisipasi masyarakat ini tergolong rendah sehingga perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Pariwisata Candidasa.

**Kata kunci:** Partisipasi, masyarakat lokal, pertukaran modal, material insentif, Candidasa

## 1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan instrumen yang mampu mengoptimalkan kualitas jasa lingkungan, kualitas pengalaman bagi pengunjung, dan kualitas hidup masyarakat lokal (Choi dan Turk 2011; Liu 2003). Demikian pula dengan pariwisata di Kawasan Candidasa, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pariwisata di kawasan ini juga dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kunjungan bagi wisatawan, menjaga kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dapat disebutkan bahwa keberadaan Kawasan Pariwisata Candidasa merupakan alat strategis yang mampu memadukan antara upaya perlindungan alam dan budaya dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan yang biasanya berada di sekitar destinasi pariwisata berbasis alam dan budaya.

Selain itu pengembangan pariwisata sangat relevan dalam konteks pembangunan sosial ekonomi masyarakat perdesaan (WTO 2002 dalam ESCAP 2003) karena pertama; produk pariwisata hanya dapat dikonsumsi di destinasi pariwisata, sehingga akan meningkatkan peluang masyarakat untuk menjual barang dan jasa lainnya (diversifikasi ekonomi masyarakat). Kedua; pembatasan

akses sektor tradisional terhadap pasar internasional, tidak berlaku dalam transaksi pariwisata. Ketiga; sumber daya alam dan budaya adalah potensi pariwisata dan merupakan aset yang dimiliki oleh masyarakat, ini berarti masyarakat harus dilibatkan di setiap proses pengembangan pariwisata. Keempat; pariwisata merupakan sektor ekonomi padat karya. Dan kelima; pariwisata memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, karena sektor pariwisata memiliki kaitan yang luas dengan sektor-sektor lainnya.

Namun kenyataannya, masyarakat perdesaan di sekitar Kawasan Pariwisata Candidasa terutama di Desa Manggis hanya sebatas menjadi objek pariwisata. Keadaan ini disebabkan oleh masih minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa. Masyarakat lokal belum berdaya untuk menangkap berbagai macam manfaat pariwisata yang tercipta dari tukar-menukar modal (kapital) dalam kegiatan pariwisata. Karena pada dasarnya, partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata akan muncul jika terdapat pertukaran modal yang dimiliki masyarakat lokal dengan para pelaku pariwisata lainnya (Bramwell dan Lane 2000; George et al. 2009).

Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini ditujukan untuk memahami praktik pertukaran modal dan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa. Pemahaman tentang pertukaran modal dan jenis partisipasi masyarakat dapat memberikan arahan guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa.

Tulisan tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan cara untuk mengungkap fenomena secara lebih mendalam berdasarkan pemahaman dan pengalaman masyarakat lokal. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan terpilih karena pengetahuan dan ketokohnya. Keseluruhan informan terdiri dari unsur pemimpin desa adat dan desa dinas, serta masyarakat yang tinggal menetap di sekitar hotel resort. Informasi yang digali terkait dengan perspektif

masing-masing informan terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa. Informasi yang terkumpul selanjutnya ditafsirkan dan disajikan sesuai dengan sebenarnya secara deskriptif.

## 2. Modal

Sesuai pemikiran Bourdieu (dalam Fashri, 2014), modal dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan yang spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Ranah adalah hubungan yang terstruktur dan mengatur posisi individu maupun kelompok dalam ruang sosial. Setiap ranah menuntut individu maupun kelompok untuk memiliki modal atau sumber daya agar dapat bertahan dalam hidup bermasyarakat atau relasi sosial. Dengan kata lain, modal dapat menentukan posisi dan status individu atau kelompok dalam masyarakat. Representasi individu maupun kelompok dalam relasi sosial terbangun dari adanya praktik pertukaran antar modal.

Masih menurut Bourdieu (dalam Fashri, 2014), modal dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu pertama; modal ekonomi mencakup alat-alat produksi, materi, dan uang yang dengan mudah digunakan dengan segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua; modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi, baik melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Termasuk modal budaya antara lain, kemampuan menampilkan diri di depan publik, pemilikan benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, dan sertifikat.

Ketiga; modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku, baik individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan pelaku atau pihak lain yang memiliki kuasa. Keempat; segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal simbolik. Berbagai jenis modal tersebut dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Semakin besar individu atau kelompok dapat mengakumulasi modal tertentu, maka semakin besar pula peluang untuk mengkonversi modal tersebut. Prinsip hierarki dan diferensiasi masyarakat tergantung pada jumlah modal yang diakumulasi.

Makin besar jumlah modal yang dikuasai dapat menunjukkan dominasi (kekuasaan dan hirarki tertinggi) dalam masyarakat.

### 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata sedikitnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pembagian manfaat pariwisata (Garrod et al. 2001; Timothy dan Boyd 2003). Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan dan kekhawatirannya terhadap pengembangan pariwisata, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan pariwisata. Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata mengandung maksud bahwa masyarakat harusnya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari sektor pariwisata dan keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya (*backward and forward linkages*).

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula penerimaan masyarakat terhadap industri pariwisata. Menurut Murphy (1985) pariwisata merupakan "*community industry*" sehingga keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dan ditentukan oleh penerimaan, dukungan, dan toleransi masyarakat terhadap pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi masyarakat menurut Pretty (dalam Mowforth dan Munt, 1998) dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu :

- a. partisipasi manipulatif; hanya pretensi, walaupun ada keterwakilan masyarakat dalam suatu lembaga resmi, namun wakil masyarakat tersebut tidak melalui proses pemilihan dan tidak mempunyai kuasa.
- b. partisipasi pasif; masyarakat hanya diinformasikan tentang apa yang sudah diputuskan atau kegiatan yang sudah berlangsung melalui pengumuman sepihak oleh pihak eksternal.
- c. partisipasi melalui konsultasi; masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi atau dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak eksternal. Perumusan masalah, peoses pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan

- keputusan ditentukan sepenuhnya oleh pihak eksternal,
- d. partisipasi untuk material insentif; masyarakat berkontribusi dengan memberikan sumber daya yang dimilikinya dan kemudian mendapat kompensasi material berupa makanan dan minuman, pekerjaan, uang, dan insentif materi lainnya. Masyarakat tidak mendapatkan pembelajaran dari pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya tersebut.
  - e. partisipasi fungsional; partisipasi masyarakat dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pihak eksternal. Pihak eksternal menginisiasi keterlibatan masyarakat dengan membentuk kelompok untuk menentukan tujuan dan terlibat secara interaktif dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi partisipasi tersebut muncul hanya setelah adanya keputusan dari pihak eksternal dengan maksud untuk efektifitas dan efisiensi program. Dapat disebutkan, terdapat kooptasi dalam jenis partisipasi ini untuk kepentingan pihak eksternal.
  - f. partisipasi interaktif; masyarakat terlibat dalam melakukan analisis bersama dengan banyak pihak termasuk pihak eksternal, menyusun rencana aksi dalam rangka merumuskan program, dan penguatan berbagai institusi lokal. Partisipasi merupakan hak masyarakat, bukan hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Memanfaatkan metode interdisiplin untuk memahami bermacam perspektif melalui pendekatan pembelajaran terstruktur dan sistematis. Masyarakat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya, sehingga masyarakat mampu mengelola struktur dan praktik.
  - g. mobilisasi sendiri; masyarakat berpartisipasi dengan cara mengambil inisiatif sendiri/independen dari pihak eksternal untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat membangun jaringan dengan pihak eksternal untuk mengakumulasi sumber daya dan mendapatkan dukungan teknis yang dibutuhkan, namun masyarakat tetap memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya. Partisipasi jenis ini dapat berkembang apabila ada kerangka dukungan terhadap perubahan sistem tersebut dari pemerintah dan lembaga



Foto 1. Pesona Kawasan Candidasa dari udara (Foto Ary Bestari, 2016)

swadaya masyarakat (LSM). Mobilisasi sendiri mampu menciptakan peluang bagi masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan manfaat dan kuasa dari suatu kegiatan.

#### **4. Pertukaran modal di Kawasan Pariwisata Candidasa**

Modal merupakan sebuah kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah. Setiap ranah memiliki tuntutan kepada setiap individu atau kelompok yang berada di dalamnya untuk memiliki modal agar dapat hidup sejahtera dan bertahan di dalamnya. Dengan kata lain modal merupakan sumber daya atau aset yang dimiliki individu atau kelompok untuk menentukan posisi dan statusnya dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Manggis, diketahui terdapat empat jenis modal dalam ranah pariwisata di Kawasan Candidasa. Keempat modal tersebut, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Semakin lengkap modal yang dimiliki oleh individu atau kelompok, maka relatif dominan posisinya dalam struktur ranah. Demikian juga dalam ranah pariwisata, posisi individu atau kelompok yang dalam hal ini disebut pelaku atau pemangku kepentingan pariwisata, akan ditentukan oleh seberapa lengkap modal



yang dimilikinya. Dengan pemahaman modal tersebut, kemudian dianalisis posisi para pemangku kepentingan dalam kegiatan pariwisata yang berada di Kawasan Pariwisata Candidasa.

Desa Manggis terletak di dalam Kawasan Pariwisata Candidasa. Di wilayah administrasi Desa Manggis tersedia beragam komponen produk pariwisata, baik berupa atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan akomodasi. Salah satu komponen produk yang memiliki posisi kuat dalam ranah pariwisata adalah akomodasi. Kuatnya posisi akomodasi ditunjukkan oleh besarnya dampak yang ditimbulkan dan mayoritas pembelanjaan wisatawan terserap untuk pembelian komponen produk pariwisata ini. Di Desa Manggis terdapat dua hotel resort, yaitu Amankila dan Alila. Keberadaan kedua resort ini dan juga produk pariwisata lainnya semestinya mampu membangkitkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat Desa Manggis.



Foto 2. Salah seorang pekerja di usaha pariwisata di Candidasa

Desa Manggis memiliki keunikan dalam pengambilan posisi dalam ranah pariwisata di Kawasan Candidasa. Peran desa adat yang wilayahnya (*wawengkon*) dibangun produk pariwisata cukup dominan dalam pengambilan keputusan dan memiliki kekuasaan relatif absolut untuk mengontrol pariwisata. Selama ini di Desa Manggis, wilayah desa adat yang dimanfaatkan untuk pengembangan produk pariwisata berada di Desa Adat Manggis dan Desa Adat Buitan.

Kedua desa adat tersebut dapat disebutkan memiliki peluang untuk mengakumulasi keempat jenis modal yang ada, termasuk modal yang dibawa oleh ranah pariwisata. Bentuk nyata upaya desa adat mengakumulasi modal adalah dengan adanya kesepakatan atau *pararem* dengan industri pariwisata, terutama dengan kedua hotel resort tersebut. Beberapa kesepakatan yang lahir sejak kedua hotel resort ini dibangun dan beroperasi sejak tahun 1992 sampai sekarang, antara lain berupa :

- a. adanya bantuan setiap tahun berupa 100 Kg beras bagi desa adat. Bantuan ini telah dikonversi ke dalam bentuk uang sesuai dengan harga beras yang berlaku saat itu.
- b. donasi (*punia*) pada waktu berlangsungnya upacara keagamaan (*piodalan*) di ketiga pura (*Tri Khayangan*) dalam desa adat. Selain itu, masyarakat juga boleh mengajukan permohonan dana untuk setiap perayaan hari raya keagamaan.
- c. 60% pekerja hotel resort berasal dari desa adat. Di samping itu, khusus untuk masyarakat desa adat yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan hotel resort, pihak manajemen hotel juga wajib menyediakan pekerjaan yang jumlahnya dua orang untuk setiap sertifikat tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal tersebut.
- d. disediakan beasiswa bagi masyarakat desa adat usia pendidikan dasar, yang jumlah siswa dan besarnya ditentukan secara kondisional.
- e. bantuan pengembangan prasarana dan sarana desa.
- f. wisatawan diperbolehkan mengunjungi desa adat untuk menikmati dan mendapatkan pengalaman kehidupan perdesaan.

- g. dan pihak desa adat mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan dan usaha pariwisata yang berlokasi di wilayahnya.

Kesemua kesepakatan ini merupakan wujud pertukaran modal yang selama ini berlangsung. Desa adat yang relatif kuat memiliki akumulasi ketiga jenis modal yaitu modal budaya, sosial, dan simbolik berupaya untuk melakukan pertukaran dengan industri pariwisata yang lebih memiliki modal ekonomi. Diharapkan dengan adanya pertukaran modal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sifat modal yang dapat dipertukarkan memungkinkan setiap individu atau kelompok tetap eksis dalam ruang pariwisata. Dari kepemilikan modal yang ada, dapat diketahui pihak mana yang mempunyai kemampuan untuk melakukan dominasi. Namun sesuai dengan kesepakatan dalam mempertukarkan modal atau lebih tepat jika disebut dengan transaksi modal, cenderung lebih menguntungkan pemilik modal ekonomi. Hal ini disebabkan modal ekonomi yang dipertukarkan berupa bantuan materi ke desa adat secara nominal relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai produk hotel resort, padahal kedua hotel resort tersebut telah mendapatkan modal-modal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal.

Ironisnya masyarakat lokal merasa cukup dan menerima saja praktik transaksi modal ini, meskipun telah berlangsung relatif lama, yaitu dari tahun 1992. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi masyarakat lokal yang memberikan kuasa kepada desa adat untuk mengakumulasi modal atau berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa, dinilai masih belum tepat.

## **5. Jenis partisipasi masyarakat lokal di Candidasa**

Apabila dikaitkan antara praktik transaksi modal yang terjadi dengan tujuh jenis atau tipe partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dapat disebutkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata

Candidasa termasuk dalam partisipasi untuk material insentif. Beberapa indikator yang menjustifikasi jenis partisipasi masyarakat lokal tersebut adalah:

- a. masyarakat Desa Manggis yang direpresentasikan oleh desa adat berpartisipasi hanya untuk mendapatkan bantuan materi dari industri pariwisata. Bantuan tersebut relatif kecil dan selama ini lebih banyak digunakan untuk upacara atau kegiatan keagamaan lainnya.
- b. tenaga kerja lokal yang terserap, sebagian besar berada pada kelas pekerja dibandingkan dengan yang berposisi sebagai pengambil keputusan (manajerial).
- c. minimnya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (ipteks) bagi masyarakat lokal. Padahal alih ipteks lebih mampu memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dibandingkan dengan hanya memberikan bantuan material saja.
- d. belum muncul inisiatif atau kreativitas masyarakat lokal untuk mensuplai kebutuhan industri pariwisata dan bahkan menciptakan produk pariwisata baru yang berbasis masyarakat lokal di Kawasan Pariwisata Candidasa. Masyarakat belum memandang pariwisata yang berkembang di wilayahnya sebagai alternatif memperoleh modal ekonomi guna melengkapi atau mengakumulasi modal yang selama ini dimilikinya.

Partisipasi untuk material insentif menunjukkan adanya ketidakmerataan dan keterbatasan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat Desa Manggis merupakan bagian dari komunitas desa adat dapat dimaknai dalam dua perspektif. Makna positifnya, masyarakat lokal memiliki posisi tawar yang tinggi, bersatu dalam komunitas desa adat ketika berhadapan dengan kekuatan eksternal yaitu industri pariwisata. Makna negatif, ketika kekuatan lokal lewat representasinya kurang mampu mengoptimalkan posisi tawar sehingga akses masyarakat lokal terhadap berbagai manfaat sosial ekonomi yang tercipta dari keberadaan Kawasan Pariwisata Candidasa masih sangat terbatas.

## 6. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa

Berdasarkan temuan tentang praktik pertukaran atau transaksi modal dan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam Kawasan Pariwisata Candidasa, diperoleh fakta bahwa tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dinyatakan relatif rendah. Hal ini disebabkan masyarakat lokal yang direpresentasikan oleh desa adat belum memiliki kesadaran dalam mengoptimalisasi modal yang dimilikinya. Modal yang dalam konteks ini diartikan sebagai instrumen yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memperoleh posisi dalam ranah pariwisata.

Dengan menggunakan konsep modal dalam menentukan posisi dan status sosial dalam ranah pariwisata di Kawasan Candidasa, masyarakat lokal yang direpresentasikan oleh desa adat belum dapat mengidentifikasi modal yang dimiliki dan menggunakannya sebagai strategi untuk mendapatkan modal lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat empat jenis modal, yang masing-masing melekat pada individu atau kelompok dengan variasi tertentu. Variasi ini menunjukkan individu atau kelompok dapat memiliki beberapa jenis modal atau hanya satu jenis modal. Tidak mungkin individu atau kelompok tidak memiliki modal sama sekali karena itu berarti tidak ada keterlibatan atau interaksi dalam suatu kegiatan tertentu.

Terkait dengan Desa Manggis, ditemukan pola bahwa terdapat sebaran modal dalam Kawasan Pariwisata Candidasa. Sebaran modal yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. masyarakat Desa Manggis yang diwakili oleh desa adat relatif memiliki modal yang lengkap, yaitu modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik, sedangkan
- b. industri pariwisata yaitu Amankila dan Alila cenderung lebih mempunyai modal ekonomi.

Seharusnya dengan memiliki modal yang lebih banyak, masyarakat Desa Manggis lebih memiliki posisi tawar atau dapat

dikatakan dominan, dibandingkan dengan industri pariwisata. Akan tetapi, keunggulan jumlah modal yang dimiliki tidak diimbangi dengan strategi yang dipakai dalam mengakumulasi atau mendapatkan modal lainnya. Dengan sifat modal yang dapat dipertukarkan, seharusnya dengan adanya pariwisata, masyarakat Desa Manggis akan mendapatkan kesempatan melengkapi jenis modal yang ditawarkan dalam ranah pariwisata di Kawasan Candidasa, yaitu modal ekonomi. Dengan kata lain, masyarakat Desa Manggis semestinya mendapatkan manfaat sosial ekonomi pariwisata yang terbangkitkan dalam Kawasan Pariwisata Candidasa. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, industri pariwisata adalah yang cenderung berhasil mengakumulasi ketiga modal lain yang dimiliki masyarakat lokal secara lebih optimal.

Kekurangoptimalan desa adat untuk mengakumulasi modal ekonomi disebabkan oleh pemikiran yang digunakan sebagai pertimbangan dalam interaksi dengan pariwisata masih menggunakan logika adat. Hal ini menjadi problematis ketika diterapkan dalam ranah pariwisata yang modern. Sebagai sebuah industri, pariwisata lebih berorientasi kepada keuntungan ekonomi. Logika adat dalam konteks ini adalah cara pandang tradisional dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Industri pariwisata masih dipandang sebagai tamu (*tamiu*) yang hanya dikenakan iuran (*peturunan*) dan donasi (*punia*) berdasarkan kesepakatan (*pararem*), dan bukan sebagai bagian desa adat.

Desa adat di Bali berfungsi untuk menjaga keharmonisan ruang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana, yaitu harmonis dalam dimensi *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Semua desa adat di Bali memiliki *Tri Khayangan* atau Pura Khayangan Tiga yang merupakan tempat pemujaan Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan dalam tiga manifestasi-Nya. Keberadaan Pura Khayangan Tiga adalah wujud keharmonisan dalam konteks relasi spiritual yang bersifat sakral (*sacred*) atau disebut dengan dimensi *parahyangan*. Dalam dimensi *pawongan*, keharmonisan diwujudkan dalam tata hubungan antara sesama anggota masyarakat adat (*krama*) dan juga dengan tamu. Sedangkan harmonisasi di dimensi *palemahan* adalah

tata ruang atau kelola lingkungan yang sesuai dengan fungsinya. Baik dimensi *pawongan* dan *palemahan* cenderung dikaitkan dengan keduniawian (*profane*) Keharmonisan secara vertikal maupun horizontal diyakini mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat lokal terutama yang berada dalam wilayah desa adat tersebut.

Tamu dalam logika adat dipandang sebagai pendatang yang memanfaatkan ruang desa adat. Ini berarti industri pariwisata dengan sistemnya telah memasuki dimensi *pawongan* dan *palemahan* desa adat sehingga yang dibebankan khususnya terhadap industri pariwisata hanyalah iuran dan donasi berdasarkan kesepakatan. Demikian juga dengan Desa Adat Manggis dan Desa Adat Buitan yang wilayahnya terdapat produk pariwisata, logika adat ini juga digunakan sehingga yang terjadi adalah relatif tidak adanya manfaat atau kontribusi pariwisata yang berarti secara sosial ekonomi yang diperoleh masyarakat lokal. Kekeliruan menempatkan logika ini tentu saja menjadikan modal yang telah masyarakat lokal miliki relatif tidak bertambah dan cenderung mengalami stagnasi. Pada akhirnya keberadaan pengembangan pariwisata dalam wilayah masyarakat di Desa Manggis dapat dikatakan belum memberikan manfaat yang berarti.

Masuknya pariwisata sejatinya merupakan peluang kerja dan usaha sebagai alternatif ekonomi masyarakat lokal selain kegiatan ekonomi primer. Yang dibutuhkan oleh desa adat adalah kontekstualisasi dan penajaman logika adat. Falsafah *Tri Hita Karana* perlu lebih dioperasionalisasikan secara lebih merata pada ketiga dimensinya. Desa adat tidak hanya berfokus pada satu dimensi saja yaitu *parahyangan*, tetapi juga pada kedua dimensi lainnya yaitu *pawongan* dan *palemahan* sebagai dimensi yang berinteraksi langsung dengan sistem pariwisata. Pariwisata sebagai industri dengan logika modern yang menyertainya, perlu dihadapi dengan strategi yang tepat oleh desa adat. Dengan kata lain, logika adat yang selama ini terkesan hanya menitikberatkan pada dimensi vertikal atau *parahyangan*, mulai diperluas dan memberi perhatian yang seimbang pada dimensi horisontalnya,

baik *pawongan* maupun *palemahan* sehingga pariwisata juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga tata hubungan dan tata ruang desa adat. Strategi yang diperlukan adalah dengan revitalisasi atau membentuk lembaga yang mawadahi semua kepentingan yang ada pada ranah pariwisata. Desa adat yang dasarnya merupakan lembaga berorientasi pada adat sebaiknya tidak berhubungan dan berhadapan langsung dengan pariwisata yang bersifat profan. Hal ini dimaksudkan agar desa adat tidak terjebak dalam pragmatisme dan terjaga kewibawaannya. Lembaga yang terbentuk akan menjadi penghubung antara masyarakat lokal secara kolektif dengan industri pariwisata, sehingga masing-masing pemangku kepentingan akan terakomodasi dan terjadi hubungan yang produktif untuk menciptakan suatu keharmonisan vertikal dan horisontal dalam masyarakat lokal di Kawasan Pariwisata Candidasa.

## 7. Simpulan

Modal masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa relatif lengkap, namun kelengkapan modal tersebut tidak disertai dengan strategi pertukaran modal yang tepat. Kekuatan modal yang dimiliki masyarakat lokal tidak mampu mengoptimalkan posisi tawar dengan industri pariwisata. Sebagai kompensasi pertukaran modal selama ini, masyarakat di sekitar Kawasan Pariwisata Candidasa hanya mendapatkan bantuan material tiap tahunnya sesuai dengan kesepakatan antara desa adat dengan industri pariwisata. Dapat dikatakan bahwa jenis partisipasi masih terbatas dan dapat digolongkan ke dalam partisipasi untuk material insentif. Semestinya masyarakat lokal mempunyai kesadaran dan kreativitas untuk menangkap berbagai manfaat yang dibangkitkan oleh pariwisata sesuai dengan modal yang dimiliki agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa.

Desa adat yang merupakan representasi masyarakat lokal menggunakan logika adat sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kesepakatan dalam ranah pariwisata. Logika adat dalam



konteks ini cenderung berorientasi pada hubungan vertikal dan memandang pariwisata sebagai tamu dan bukan sebagai bagian desa adat yang harus bertanggung jawab juga terhadap berbagai dimensi dalam masyarakat. Pilihan menempatkan logika ini tentu saja menjadikan modal yang telah masyarakat lokal miliki relatif tidak bertambah dan cenderung mengalami stagnasi. Pada akhirnya keberadaan pengembangan pariwisata dalam wilayah masyarakat lokal dapat dikatakan belum memberikan manfaat yang berarti. Desa adat merupakan lembaga yang 'disakralkan' oleh masyarakatnya, jadi sebaiknya desa adat tidak berhubungan dan berhadapan langsung dengan pariwisata yang bersifat profan. Hal ini dimaksudkan agar desa adat terjaga kewibawaannya dan tidak terjebak dalam pragmatisme yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.

Mengikuti pembahasan yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan arahan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di Kawasan Pariwisata Candidasa sebagai berikut :

- a. Mengurangi keterlibatan desa adat dalam ranah pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada lembaga bentukan yang mewadahi berbagai kepentingan pariwisata, terutama kepentingan masyarakat lokal. Lembaga ini akan mempunyai posisi strategis untuk mengakomodasi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan pariwisata.
- b. Menciptakan produk pariwisata berbasis masyarakat lokal dalam kawasan pariwisata. Produk pariwisata berjenis ini mampu memberikan peluang bagi tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat lokal baik dalam pengambilan keputusan maupun pembagian manfaat pariwisata.
- c. Membangun kemitraan dengan dengan segenap pelaku usaha pariwisata, terutama dengan pihak penyedia layanan akomodasi, sehingga wisatawan yang menginap dapat diprogramkan juga untuk menikmati produk pariwisata yang dicipta oleh masyarakat lokal.

- d. Memastikan kehadiran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran pariwisata masyarakat lokal dan memfasilitasi hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pelaku usaha pariwisata.
- e. Memerlukan kajian lebih lanjut mengenai bentukan lembaga yang tepat untuk menghubungkan kepentingan masyarakat lokal dengan industri pariwisata dalam suatu kawasan pariwisata. Selain itu juga dibutuhkan penelitian terapan tentang produk pariwisata berbasis masyarakat lokal dalam suatu kawasan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bramwell, Bill dan B. Lane. 2000. "Collaboration and Partnerships in Tourism Planning", dalam B. Bramwell dan B. Lane (eds). *Tourism Collaboration and Partnerships; Politics, Practice and Sustainability*. UK: Channel View Publications.
- Choi, H.C., dan E.S. Turk. 2011. "Sustainability Indicators for Managing Community Tourism", dalam M. Budruk and R. Phillips (eds). *Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management*. New York: Springer.
- Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP). 2003. *Poverty Alleviation through Sustainable Tourism Development*. New York: United Nations.
- Fashri, Fauzi. 2104. *Pierre Bourdieu; Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Garrod, Brian, J.C. Wilson dan D.B. Bruce. 2001. *Planning for Marine Ecotourism in the EU Atlantic Area: Good Practice Guidelines*. Bristol: Project Report University of the West of England.
- George, E. Wanda, H. Mair dan D.G. Reid. 2009. *Rural Tourism Development Localism and Cultural Change*. UK: Channel View Publications.
- Liu, Zhenhua. 2003. "Sustainable Tourism Development: A Critique", *Journal of Sustainable Tourism*. 11(6): 459-475.

Murphy, Peter E. 1985. *Tourism A Community Approach*. New York: Methuen.

Mowforth, Martin and I. Munt. 1998. *Tourism and Sustainability; New Tourism in the Third World*. New York: Routledge.

Timothy, Dallen J. and S.W. Boyd. 2003. *Heritage Tourism*. England: Pearson Education.